

## MENINGTEGRASIKAN LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN FORMAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH

(Integrating Formal and Nonformal Education Service to Increase the Quality of Education in  
Schools)

Oleh Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Dosen Universitas Islam Malang – UNISMA  
Jl. Mt. Haryono 193 Malang

E-mail: [rulam@infodiknas.com](mailto:rulam@infodiknas.com)

Website: [www.infodiknas.com](http://www.infodiknas.com)

=====

### ABSTRACT

*The quality of education in schools still showed no improvement of symptoms significantly. Figures failure in national examinations continued in various regions. Schools may have been trying to improve the quality of education, however, probably because the strategies are less effective, then the result is not effective. The school has a lot of limitations to truly improve the quality of education, which include limited time, rigid curriculum, and teachers' limited capabilities. Therefore, it is necessary the effective solution to resolve the issue. Integrating non-formal and formal education in schools is an alternative that should be considered. Non-formal education system with the characteristics and flexible implementation can offer services to contribute to improving the quality of education in schools. The students cantake their free time to follow the guidance of learning in non-formal education institutions, namely the so-called tutoring. Services on non-formal education, especially curriculum (materials) that can be adapted to the learners and the learning time can be adjusted by spare time learners is possible to complement the needs of education in schools, the need for improving the quality of education at all levels of formal education.*

#### Key Words

*Integrating*

*public service*

*formal education*

*Non-formal education*

*quality of education*

#### Abstrak

Kualitas pendidikan di sekolah masih menunjukkan gejala tidak ada peningkatan secara signifikan. Angka ketidakkulusan dalam ujian nasional terus terjadi di berbagai daerah. Sekolah-sekolah mungkin telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, namun mungkin karena strategi yang ditempuh kurang efektif, maka hasilnya pun tidak efektif. Sekolah memiliki banyak keterbatasan untuk betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, seperti terbatasnya waktu, kurikulum yang kaku, dan kemampuan guru yang terbatas. Oleh sebab itu maka perlu ada solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Persoalan ini dapat dipecahkan dengan meningkatkan sistem pelayanan publik bidang pendidikan untuk menemukan solusi yang efektif. Salah satu alternatif yang bisa diambil adalah pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan nonformal dengan karakteristik dan system penyelenggaraannya yang fleksibel dapat menawarkan layanan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di

sekolah. Para siswa dapat mengambil waktu senggang mereka untuk mengikuti bimbingan belajar di berbagai lembaga pendidikan nonformal, yakni yang disebut dengan bimbingan belajar. Layanan pada pendidikan nonformal, terutama kurikulumnya (materi) yang dapat disesuaikan dengan belajar peserta didik dan waktunya dapat disesuaikan dengan waktu senggang peserta didik sangat memungkinkan untuk melengkapi kebutuhan pendidikan di sekolah, yakni kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal.

### Kata Kunci:

mengintegrasikan layanan publik pendidikan formal  
pendidikan nonformal kualitas pendidikan

## 1. Pendahuluan

Persoalan pendidikan di tanah air, Indonesia, tetap berkuat dalam empat hal, yakni masalah pemerataan, kualitas, manajemen, dan relevansi. Salah satu persoalan yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah masalah kualitas. Menurut Kotler (2000:57) kualitas adalah semua aktivitas untuk mempermudah pelanggan menghubungi pihak yang tepat dalam perusahaan, serta mendapatkan layanan, jawaban, dan penyelesaian masalah yang cepat dan memuaskan. Wyckof dalam Tjiptono, (2004: 260) mendefinisikan kualitas adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang unggul dan memenuhi kebutuhan peserta didik dan/atau masyarakat. Pertanyaannya sekarang apakah layanan pendidikan kita telah sesuai dengan harapan peserta didik atau belum.

Secara faktual bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Gejalanya dapat dilihat antara lain dari angka ketidakkulusan dalam ujian negara dan pengangguran para lulusan yang terus berkembang. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya dan strategi, termasuk usaha peningkatan kualitas guru melalui berbagai ragam seminar dan pelatihan, pemenuhan kebutuhan buku ajar berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE), sertifikasi guru, laboratorium sekolah, dan lain sebagainya kualitas pendidikan masih belum menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan. Bahkan pemerintah juga memberikan beasiswa bagi para guru untuk studi lanjut baik Program Strata 1 (S1) maupun Strata 2 (S2) untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Ternyata belum memberikan kontribusi yang memuaskan.

Perjuangan peningkatan kualitas pendidikan telah ditimpakan pada guru karena guru yang memiliki tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik para peserta didik. Pandangan yang hingga saat ini tetap menguat bahwa kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab guru dan sekolah (kepala sekolah). Pandangan ini tidak bisa ditawar-tawar dengan alasan bahwa gurulah yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga setiap program peningkatan kualitas pendidikan adalah berpusat pada guru dan sekolah sebagai pusat kegiatan pendidikan (pembelajaran) tanpa menyadari bahwa guru dan sekolah memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara memuaskan.

Sebenarnya ada potensi yang berkembang di masyarakat dan dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, yakni lembaga pendidikan nonformal yang mengelola berbagai jenis pendidikan, khususnya bimbingan belajar. Pendidikan nonformal yang berkembang di masyarakat merupakan aset bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, tinggal sekarang bagaimana sekolah mampu membangun akses terhadap aset tersebut dan memberdayakannya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Semua ini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan pimpinan lembaga pendidikan formal (SD/MI, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/MA/SMK) untuk membangun

kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal memiliki banyak kelebihan, sehingga lembaga pendidikan tersebut terus berkembang di masyarakat. Banyak kebutuhan pendidikan masyarakat mulai dari mereka yang berstatus sebagai pelajar (siswa/mahasiswa) hingga masyarakat luas yang tidak mungkin memperoleh jenis pendidikan tertentu yang dibutuhkan dapat diperoleh di sekolah, sehingga mereka menempuh jalur pendidikan nonformal. Begitu juga para siswa yang karena keterbatasan yang ada di sekolah, maka mereka mengikuti pendidikan nonformal dengan maksud untuk menunjang penguasaan materi pelajaran yang diberikan di sekolah.

Inisiatif untuk memberdayakan lembaga pendidikan nonformal dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah hendaknya diprakarsai oleh pemerintah sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab dalam bidang layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Layanan publik antara lain berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan.

## 2. Konsep dan Prinsip Layanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela dkk., 2008:5). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditekankan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Istilah pemenuhan kebutuhan peserta didik mengandung makna bahwa pelayanan pendidikan itu mengedepankan apa yang peserta didik butuhkan, bukan apa yang pemerintah atau kepala sekolah inginkan.

Ada beberapa ide pokok dalam pelayanan publik sehingga memungkinkan kebutuhan publik dapat terlayani dengan memuaskan. Beberapa prinsip utama dalam pelayanan publik adalah sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Denhardt & Janet Vinzant Denhardt (Nawawi, 2010:34-35 dan Terry, 2000:549) sebagai berikut:

- 1) Melayani warga negara, bukan pelanggan (*Serve the citizens not customers*). Kepentingan publik adalah hasil daripada dialog tentang nilai-nilai bersama daripada kumpulan kepentingan pribadi individual. Oleh karena itu para pelayan publik tidak hanya merespon tuntutan para "pelanggan" tetapi fokus pada membina hubungan kepercayaan dan kerjasama dengan dan antar warga negara.
- 2) Kepentingan publik adalah tujuan, bukan produk (*The public interest is the aim, not the by-product*). Para administrator publik harus berkontribusi untuk membina gagasan kolektif dan bersama tentang kepentingan publik. Tujuannya adalah bukan untuk menemukan solusi cepat yang dikendalikan oleh pilihan-pilihan individual. Lebih dari itu adalah kreasi kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
- 3) Menilai kewarganegaraan dan layanan publik melebihi kewiraswastaaan (*Value citizenship and public service above entrepreneurship*). Kepentingan publik dikedepankan dengan lebih baik oleh para pelayan publik dan warga negara yang komit untuk membuat kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat daripada manajer pengusaha yang bertindak seolah-olah uang publik adalah milik mereka sendiri.
- 4) Berpikir secara strategis, bertindak secara demokratis (*Think strategically, act democratically*). Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara paling efektif dan bertanggung jawab melalui usaha bersama dan proses kerjasama.

- 5) Akuntabilitas adalah tidaklah mudah (*Accountability isn't simple*). Para pelayanan publik harus perhatian pada orang banyak daripada pasar; mereka harus juga mengikuti peraturan perundangan dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara.
- 6) Melayani daripada mengendalikan (*Serve rather than steers*). Peranan pelayanan publik yang semakin meningkat untuk membantu warga negara mengartikulasi dan memenuhi kepentingan-kepentingan bersama mereka daripada mengarah untuk mengawasi atau mengendalikan masyarakat dalam arah-arrah baru.
- 7) Menilai masyarakat, bukan hanya produktivitas (*Value people, not just productivity*). Organisasi publik dan jaringan kerja di mana mereka berpartisipasi lebih mungkin untuk berhasil dalam jangka panjang apabila mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama berbasis pada penghargaan terhadap semua warga negara.

### 3. Definisi dan Karakteristik Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal telah didefinisikan oleh Kleis (1973:6) sebagai usaha pendidikan yang melembaga dan sistematis (biasanya di luar sekolah tradisional) di mana isi diadaptasikan pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang spesifik (atau situasi yang spesifik) untuk memaksimalkan belajar dan meminimalkan unsur-unsur lain yang sering dilakukan oleh para guru sekolah formal. Pendidikan nonformal lebih berpusat pada peserta didik daripada pendidikan formal. Dalam pendidikan nonformal peserta didik dapat meninggalkan waktu yang tidak mereka sukai. Pendidikan nonformal cenderung menekankan sebuah kurikulum kafeteria (pilihan-pilihan) daripada ditentukan sebelumnya, yaitu kurikulum sebagaimana dijumpai di sekolah-sekolah. Dalam pendidikan nonformal hubungan-hubungan manusia lebih informal (peranan-peranan guru dan peserta didik lebih tidak kaku dan sering bergantian) daripada di sekolah-sekolah di mana guru-murid dan peranan administrator guru bersifat hirarkis dan jarang berubah dalam jangka waktu pendek. Pendidikan nonformal fokus pada pengetahuan dan keterampilan praktis sementara, sekolah sering fokus pada informasi yang menunda aplikasi. Seluruh pendidikan nonformal memiliki tingkat struktur yang lebih rendah (oleh karena itu lebih fleksibel) daripada sekolah. Menurut Tight (1983:6) bahwa pendidikan nonformal merupakan usaha pendidikan yang disengaja yang dilaksanakan di luar sistem persekolahan.

Paulston (dalam La Belle, 1976:12) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal itu adalah aktivitas-aktivitas pendidikan dan pelatihan di luar sekolah yang terstruktur dan sistematis dalam durasi yang relatif pendek yang disponsori oleh para agen untuk terjadinya perubahan perilaku yang konkret dalam penduduk sasaran tertentu (baca Paulstone, 1972:ix). Sedangkan menurut Brembeck (dalam La Belle, 1976:12) memberikan definisi bahwa pendidikan nonformal itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan belajar yang terjadi di luar sistem pendidikan yang diorganisir secara formal untuk mendidik ke arah tujuan-tujuan khusus di bawah sponsorsip baik orang (individu), kelompok, maupun organisasi (baca Paulstone, 1972:ix).

UNESCO (1997:41) memberikan definisi bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisir dan berkelanjutan yang tidak berkaitan secara tepat pada definisi pendidikan formal. Pendidikan nonformal bisa terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga pendidikan, dan melayani orang-orang semua usia. Tergantung pada konteks negara, bisa mencakup program-program pendidikan termasuk bagi orang dewasa yang belum bisa membaca, pendidikan dasar untuk anak-anak di luar sekolah, keterampilan kehidupan (*life-skills*), keterampilan kerja (*work-skills*), dan kebudayaan umum. Program pendidikan nonformal tidak perlu mengikuti sistem "tangga", memiliki durasi yang berbeda, dan memperoleh atau tidak memperoleh sertifikat dari belajar yang dicapai.

Berdasarkan beberapa definisi pendidikan nonformal di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar system pendidikan formal (sekolah).

Pendidikan nonformal yang inovatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Program pendidikan nonformal muncul sebagai inovasi untuk memecahkan masalah yang menekan dalam masyarakat tertentu.
- 2) Tujuan pendidikan nonformal diorientasikan bukan untuk memperoleh sertifikat.
- 3) Pendidikan nonformal menekankan pada pemecahan masalah-masalah khusus daripada belajar mata pelajaran yang abstrak.
- 4) Pendidikan nonformal membantu memprakarsai sebuah program atau proyek setelah fase eksperimental.
- 5) Pendidikan nonformal fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan partisipatori.
- 6) Pendidikan nonformal lebih praktis daripada teoritis.
- 7) Otonom pada tingkat program dan kesempatan yang kurang dari kontrol luar.
- 8) Lebih bersifat ekonomis karena menggunakan fasilitas yang ada.
- 9) Pendidikan nonformal berlangsung sepanjang proses kehidupan.

Combs & Ahmed (1973:233-234) mengetengahkan ada beberapa sifat atau karakteristik pendidikan nonformal, yakni sebagai berikut:

- 1) keluwesan (fleksibilitas) untuk disesuaikan dengan kebutuhan khusus setempat, serta dalam mengubah dan menyesuaikan kondisi kesempatan dalam memilih matapelajaran serta memilih cara mengajarnya dalam mengadakan kombinasi pelajaran teori dan latihan praktis.
- 2) keleluasan untuk disesuaikan dengan keperluan anak didik, misalnya dengan mengatur pengajaran sambil yang disesuaikan dengan tugas pada tempat bekerja atau dalam kalangan keluarga dengan menyusun satuan-satuan pelajaran yang tertentu yang boleh dipelajari dan diselesaikan oleh masing-masing siswa dalam jangka waktu yang lebih cocok. Serta yang memungkinkan mereka dapat masuk keluar berganti-ganti ke dalam proses pengajaran, sesuai dengan kehendak dan kesempatan masing-masing.
- 3) Kemampuan untuk memanfaatkan tenaga ahli, fasilitas, dan dukungan masyarakat setempat. Untuk memupuk rasa turut memiliki dan turut mengurus di kalangan masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih mampu bertahan dalam segi ekonominya (Combs & Ahmed, 1973:233-234).

Callaway dalam La Belle (1973:18) mengemukakan sifat umum pendidikan nonformal dengan memberikan garis besar karakteristik pendidikan nonformal sebagai berikut: Program-program pendidikan nonformal pada umumnya:

- 1) merupakan pelengkap pendidikan formal,
- 2) beragam dalam hal organisasi, sponsor, dan metode-metode pembelajaran,
- 3) suka rela dan mencakup rentangan usia, latar belakang, dan kepentingan kepentingan yang luas,
- 4) tidak mengarah pada perolehan kredensial atau diploma,
- 5) menyesuaikan tempat tinggal dan pekerjaan para peserta didik,
- 6) lentur (*fleksibel*) dan dapat disesuaikan (*adaptable*) dalam hal waktu, lama, dan tujuan.

Menurut O.P. Dahama dan O.P. Bhatnagar bahwa pendidikan nonformal itu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Fleksibel.
- 2) Berorientasi pada kehidupan, lingkungan, dan peserta didik.
- 3) Beragam dalam isi dan metode.
- 4) Tidak otoriter.
- 5) Dibangun berdasarkan partisipasi peserta didik.
- 6) Memobilisir sumber-sumber lokal.

7) Memperkaya potensi manusia dan lingkungan.

Menurut La Belle (1976:1) bahwa pendidikan nonformal umumnya mengarah pada program-program luar sekolah yang terorganisir untuk memberikan pengalaman belajar yang spesifik bagi populasi sasaran tertentu. Biasanya dihubungkan dengan negara-negara terbelakang, mayoritas usaha-usaha pendidikannya ditujukan pada orang dewasa maupun pemuda yang miskin secara sosial dan ekonomi, yang mencangkup ekstensi pertanian, pembangunan masyarakat, peningkatan kesadaran, pelatihan teknis/vokasional, dan program-program yang sejenis. Program ini biasanya dirancang untuk memperbaiki daya atau status partisipan dengan menambah stok ketrampilan dan pengetahuan untuk mengubah sikap-sikap dasar dan nilai-nilai ke arah pekerjaan dan kehidupan. Dengan berkonsentrasi pada peningkatan daya dan status penduduk miskin secara sosial ekonomi, diskusi pendidikan nonformal harus mempertimbangkan lebih dari sekedar perubahan perilaku partisipan maupun sistem sosial yang lebih luas untuk menilai cara-cara perilaku bertinteraksi dengan lingkungan fisik dan manusia.

Dengan melihat definisi dan karakteristik pendidikan non-formal sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan betapa besar manfaat pendidikan non-formal jika disinergikan dengan pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekarang peran apa yang dapat dimainkan oleh pendidikan non-formal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Uraian di bawah ini akan mengetengahkan bentuk konkret kegiatan pendidikan non-formal yang berkontribusi pada pendidikan formal.

#### **4. Peranan Pendidikan Non-formal dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal**

Ada beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Beberapa peran penting tersebut antara lain: (1) Pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal; (2) Pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal.

##### **4.1 Pendidikan Nonformal sebagai Pelengkap Pendidikan Formal**

Sebagaimana lazimnya terjadi di sekolah bahwa kurikulum yang harus diselesaikan oleh siswa sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak pula. Akibatnya yang terjadi adalah sekian banyak materi pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, tetapi waktu yang tersedia sangat terbatas. Hal ini memungkinkan para siswa terhambat untuk menyerap materi pelajaran dalam waktu yang cepat itu. Akibatnya mereka akan ketinggalan dalam menguasai materi pelajaran. Jalan keluarnya antara lain bahwa mereka hendaknya mencari alternatif jalan keluar untuk bisa ketertinggalan pelajaran sekolah melalui jalur pendidikan di luar sekolah.

Pendidikan nonformal sebagai pelengkap mengandung arti bahwa pendidikan nonformal itu menyediakan layanan pendidikan untuk melengkapi kebutuhan belajar siswa di sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu para siswa yang mengalami ketertinggalan itu untuk mengejar penguasaan materi di sekolah sehingga mereka bisa sukses dalam menempuh pendidikan di sekolah. Mereka mampu menjawab atau menyelesaikan tugas-tugas pelajaran di sekolah, termasuk dalam rangka menghadapi ujian-ujian yang dilaksanakan sekolah maupun ujian Negara.

Para siswa yang menempuh pendidikan nonformal bisa meminta pada pengelola lembaga pendidikan nonformal (Bimbingan Belajar atau kursus-kursus belajarnya) materi apa yang ingin mereka program dan kapan serta berapa kali kegiatan pembelajaran bisa diatur. Jadi peran sebagai pelengkap pendidikan formal, maka penyelenggaraan pendidikan nonformal itu harus mengacu yang para peserta didik ingin belajari, bukan program apa yang direncanakan oleh pengelola lalu diikuti oleh peserta didik. Memang dalam lembaga pendidikan nonformal tertentu para pengelola telah melakukan survey dan mempelajari materi pelajaran (kurikulum) sekolah, kemudian mereka menyusun kurikulum (materi pembelajaran) berdasarkan kurikulum tersebut, di mana calon peserta didik tinggal memilih yang mana. Hal yang demikian lazim juga terjadi di pendidikan nonformal.

#### 4.2 Pendidikan Nonformal sebagai Pengganti Pendidikan Formal

Sebagai pengganti pendidikan formal, pendidikan nonformal memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat (calon peserta didik) yang karena beberapa hal sehingga mereka tidak mungkin memperoleh pendidikan yang dibutuhkan melalui jalur pendidikan formal.

Warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan tidak memandang usia karena sepanjang kehidupan manusia akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan kemampuan baru. Sementara dilihat dari segi usia atau kesempatan yang dimiliki mereka tidak mungkin memperoleh pendidikan tersebut lewat jalur sekolah. Bagi kaum ibu rumah tangga, misalnya, maka kebutuhan pendidikan mereka tidak mungkin lewat jalur sekolah, melainkan hanya bisa menempuh pendidikan yang dibutuhkan lewat jalur pendidikan nonformal atau formal. Termasuk juga anak-anak dari kalangan orangtua miskin yang cenderung terkendala untuk bersekolah, maka untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui jalur pendidikan nonformal.

Program pendidikan nonformal yang menjadi pengganti pendidikan formal adalah apa yang disebut dengan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan yang dikembangkan di Indonesia adalah Pendidikan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Kejar Paket B setara dengan SLTP, dan Kejar Paket C setara dengan SMA. Perlakuan pada pendidikan kesetaraan ini sama dengan pendidikan formal, di mana para lulusannya memperoleh ijazah, dan ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan di jalur formal pada jenjang di atasnya.

#### 5. Mengintegrasikan Layanan Pendidikan Non-formal dalam Sistem Pendidikan Formal

Dilihat dari sisi sekolah, tujuan mengintegrasikan pendidikan nonformal ke dalam layanan pendidikan formal adalah untuk membantu kemudahan sekolah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Dari sisi pendidikan nonformal adalah memberikan kontribusi layanan pendidikan untuk membantu peserta didik dan sekolah dalam merealisasikan harapan dan tujuan keduanya (peserta didik dan sekolah). Untuk melaksanakan pengintegrasian pendidikan nonformal ke dalam sistem pendidikan formal perlu dilaksanakan strategi efektif agar sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Kedua belah pihak sama-sama memiliki visi, misi, dan tujuan masing-masing yang tentu ada persamaan dan perbedaan. Untuk menggalang langkah yang sama ke arah tujuan yang sama maka strategi efektif sangat diperlukan.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh sekolah antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan kurikulum sekolah pada lembaga pengelola pendidikan nonformal yang ada di wilayah sekitar sekolah.
- 2) Membuat MOU kerjasama secara resmi antara sekolah dan pengelola lembaga pendidikan nonformal sebagai ikatan kerjasama.
- 3) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program pendidikan nonformal.
- 4) Sekolah melakukan kontrol terhadap hasil belajar siswa dengan melakukan tes hasil belajar secara periodik untuk mengetahui tingkat kemajuan hasil belajar.
- 5) Melaporkan tingkat kemajuan hasil belajar yang dicapai siswa pada pihak pelaksana pendidikan nonformal.
- 6) Melakukan pertemuan periodik dan terprogram untuk mengevaluasi dan sekaligus memantapkan pelaksanaan pendidikan di kedua lembaga pendidikan bersangkutan.
- 7) Sekolah memperbolehkan pengelola pendidikan nonformal untuk mendayagunakan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah secara terkontrol.
- 8) Sekolah melakukan evaluasi dan masukan terhadap pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan nonformal sebagai mitra kerja sehingga betul-betul *match* dengan program sekolah.
- 9) Pertemuan berkala secara segi tiga, yakni pihak sekolah, pengelola lembaga pendidikan nonformal, dan orangtua/wali peserta didik dalam rangka pengembangan

penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan bersama antara sekolah dan lembaga pendidikan nonformal.

- 10) Pemberian hadiah (*reward*) pada lembaga pendidikan nonformal yang berhasil memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

### Simpulan

Masalah rendahnya kualitas pendidikan formal (sekolah) merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan bersama pemerintah dan masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan di sekolah bukan menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi masyarakat dan orangtua juga dituntut untuk berkontribusi memberikan alternatif efektif untuk memecahkan masalah tersebut.

Pengembangan pendidikan non-formal merupakan solusi yang bisa dijadikan terobosan untuk mendongkrak kualitas pendidikan di sekolah. Hanya saja selama ini sekolah dan pendidikan non-formal berjalan sendiri-sendiri, padahal sebenarnya kedua jalur pendidikan tersebut bisa saling berkontribusi.

Oleh sebab itu maka para pimpinan sekolah, khususnya pemerintah, perlu memberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan secara optimal potensi pendidikan non-formal seperti lembaga-lembaga bimbingan belajar (bimbel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini perlu ada kebijakan tertentu sehingga antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal lebih bersinergi secara terprogram dan berkesinambungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Brembeck, Cole. 1973. "Introduction," in Cole Brembeck and Timothy J. Thompson, eds. *New Strategies for Educational Development*. Lexington, Ma.: Lexington Books.
- Coombs, P. 1973. *New Paths to Learning for Rural Children and Youth*. New York, NY: International Council for Educational Development.
- Dahama, O.P. & O.P. Bhatnagar. *Education and Communication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- La Belle, Thomas J. 1976. *Nonformal Education and Social Change in Latin America*. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications & University of California.
- Nawawi, Ismail. 2006. *Pembangunan dan Problema Masyarakat. Kajian Konsep Model Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologis*. Surabaya: Pustaka VIV Grafika.
- Paulston, Rolland. 1972. *Non-formal Education, an Annotated International Bibliography*. New York: Praeger Publishers.
- Sudjana, H. D. 2004. *Pendidikan Nonformal*. Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas. Bandung: Falah Production.
- Terry, Larry D. 2000. *Public Administration Review*. November/December, Volume 60, Number 6.
- Tight, Malcolm (Ed.). "Adult Learning and Education." *Education for Adults*. Volume I. London: Croom Helm in association with The Open University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.